



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.1362, 2014**

**KEMENKUMHAM. Tunjangan Kinerja. Jabatan.  
Kelas Jabatan. Pelaksanaan. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11  
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang  
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi  
Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**

**2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan

**Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

4. **Kelas Jabatan** adalah tingkat jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
5. **Sasaran Kerja Pegawai** yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
6. **Jam Kerja** adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. **Tugas Belajar** adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.

#### **Pasal 2**

Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB II**

#### **KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA**

#### **Pasal 3**

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:

- a. target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP; dan
- b. kehadiran menurut hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai.

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap jabatan struktural di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

### Pasal 6

Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional berdasarkan Kelas Jabatan dan hasil penilaian SKP.

## BAB III

### HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

#### Pasal 7

- (1) Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditentukan sebagai berikut:
  - a. pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
  - b. pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari Jum'at;
  - c. pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
  - d. pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk Istirahat pada hari Jum'at.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. penugasan atasan langsung;
  - b. keputusan pimpinan unit kerja; atau
  - c. hari dan Jam Kerja tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar atau pendidikan kedinasan.
- (3) Penentuan hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari unit kerja atau institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
- (4) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja sampai dengan pukul 8.00 waktu setempat atau 30 (tiga puluh) menit dari jadwal Jam Kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib

mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama.

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Penggantian waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan.

#### **Pasal 9**

Pegawai yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, jika:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya;
- c. tidak masuk kerja; dan/atau
- d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja, tanpa persetujuan atau izin dari atasan langsung atau atasan dari atasan langsung.

#### **Pasal 10**

- (1) Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan Jam Kerja pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik di unit kerja masing-masing.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual, jika:
  - a. perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
  - c. terjadi keadaan bencana alam dan/atau kerusuhan, sehingga pencatatan kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
  - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik.

### **BAB IV**

## **PEMOTONGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI**

#### **Pasal 11**

Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jabatan fungsional umum sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

### Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja.

### Pasal 13

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar, dibayarkan secara proporsional sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Tugas Belajar yang melebihi waktu yang diberikan berdasarkan izin Tugas Belajar dari pimpinan unit kerja, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar:
  - a. 50% (lima puluh per seratus) pada tahun pertama;
  - b. 25% (dua puluh lima per seratus) pada tahun kedua; dan
  - c. 10 % (sepuluh per seratus), jika lebih dari 2 (dua) tahun.

### Pasal 14

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu yang bersangkutan.

### Pasal 15

Pegawai dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak masuk kerja sebesar 5% (lima per seratus) per hari;
- b. tidak mengikuti pendidikan kedinasan atau Tugas Belajar sebesar 5% (lima per seratus) per hari; dan
- c. tidak berada di tempat tugas sebesar 1% (satu per seratus) per hari.

### Pasal 16

Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali terlambat;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk setiap kali terlambat; dan
- d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat.

#### **Pasal 17**

Pegawai yang tidak memenuhi penggantian Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai potongan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).

#### **Pasal 18**

Bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; dan
- d. dalam rentang waktu 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya.

#### **Pasal 19**

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus).

- b. Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
1. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  2. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
  3. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

#### Pasal 20

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

#### Pasal 21

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan kedua, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak ketiga dan keempat, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
  1. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pertama sebesar 60% (enam puluh per seratus);
  2. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kedua sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
  3. sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ketiga sebesar 20% (dua puluh per seratus).

#### Pasal 22

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
  - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari; dan
  - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) per hari.



- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran dalam waktu paling lama:
  - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit, untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

### Pasal 23

- (1) Bagi Pegawai yang memiliki izin dan alasan yang sah, potongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16, dan Pasal 18, hanya dikenai setengah dari besaran potongan Tunjangan Kinerja yang seharusnya dikenakan.
- (2) Izin atau alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan izin atau surat keterangan yang telah disetujui oleh atasan langsung.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pejabat yang menangani pencatatan kehadiran dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah melaksanakan izin.
- (4) Format surat permohonan izin dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### PENCATATAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 24

- (1) Pencatatan nilai capaian SKP dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode pencatatan kehadiran yang dilakukan antara tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan berjalan sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berikutnya.
- (3) Pencatatan nilai capaian SKP, kehadiran, dan pelaksanaan cuti Pegawai dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah pejabat struktural eselon V atau PNS yang pangkatnya paling rendah setingkat pejabat struktural eselon V.

#### Pasal 25

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) membuat laporan rincian pembayaran bulanan Tunjangan Kinerja Pegawai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan pencatatan capaian SKP, kehadiran, serta pelaksanaan cuti Pegawai.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja yang menangani pembayaran Tunjangan Kinerja dalam waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-18.KU.01.01 Tahun 2011 tentang

**Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 28**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 22 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
1	SEKRETARIS JENDERAL	17	27.577.500
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15	15.997.500
3	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA	12	8.210.250
4	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN FASILITASI TELEMATIKA	9	4.522.500
5	KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI TELEMATIKA	9	4.522.500
6	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
7	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN TELEMATIKA	9	4.522.500
8	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12	8.210.250
9	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I	9	4.522.500
10	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN II	9	4.522.500
11	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN III	9	4.522.500
12	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN IV	9	4.522.500
13	KEPALA BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
14	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN I	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
15	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN II	9	4.522.500
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN III	9	4.522.500
17	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN ANALISA DAN PELAPORAN IV	9	4.522.500
18	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	12	8.210.250
19	KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI I	9	4.522.500
20	KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI II	9	4.522.500
21	KEPALA SUBBAGIAN ORGANISASI III	9	4.522.500
22	KEPALA BAGIAN TATALAKSANA	12	8.210.250
23	KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI SARANA KERJA	9	4.522.500
24	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM, PROSEDUR DAN METODA	9	4.522.500
25	KEPALA SUBBAGIAN ANALISA TATA LAKSANA	9	4.522.500
26	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
27	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	15	15.997.500
28	KEPALA BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
29	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	9	4.522.500
30	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
31	KEPALA SUBBAGIAN JAMINAN SOSIAL	9	4.522.500
32	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
33	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	12	8.210.250
34	KEPALA SUBBAGIAN ANALISA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9	4.522.500
35	KEPALA SUBBAGIAN ANALISA KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI	9	4.522.500
36	KEPALA SUBBAGIAN SELEKSI PENGEMBANGAN PEGAWAI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
37	KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI	12	8.210.250
38	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI I	9	4.522.500
39	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI II	9	4.522.500
40	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI III	9	4.522.500
41	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI IV	9	4.522.500
42	KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN, PENSIUN DAN DISIPLIN PEGAWAI	12	8.210.250
43	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN I	9	4.522.500
44	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN II	9	4.522.500
45	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN III	9	4.522.500
46	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DISIPLIN PEGAWAI	9	4.522.500
47	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
48	KEPALA SUBBAGIAN TATA NASKAH I	9	4.522.500
49	KEPALA SUBBAGIAN TATA NASKAH II	9	4.522.500
50	KEPALA SUBBAGIAN PENGGANDAAN I	9	4.522.500
51	KEPALA SUBBAGIAN PENGGANDAAN II	9	4.522.500
52	KEPALA BIRO KEUANGAN	15	15.997.500
53	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	12	8.210.250
54	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I	9	4.522.500
55	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN II	9	4.522.500
56	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN III	9	4.522.500
57	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN IV	9	4.522.500
58	KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN TATA USAHA KEUANGAN	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
59	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
60	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN	9	4.522.500
61	KEPALA SUBBAGIAN KERUGIAN NEGARA	9	4.522.500
62	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
63	KEPALA BAGIAN PENGUJIAN DOKUMEN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR	12	8.210.250
64	KEPALA SUBBAGIAN PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR I	9	4.522.500
65	KEPALA SUBBAGIAN PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR II	9	4.522.500
66	KEPALA SUBBAGIAN PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR III	9	4.522.500
67	KEPALA SUBBAGIAN PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IV	9	4.522.500
68	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
69	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I	9	4.522.500
70	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN II	9	4.522.500
71	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN III	9	4.522.500
72	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN IV	9	4.522.500
73	KEPALA BIRO PERLENGKAPAN	15	15.997.500
74	KEPALA BAGIAN ANALISA KEBUTUHAN	12	8.210.250
75	KEPALA SUBBAGIAN PENYEDIAAN DATA	9	4.522.500
76	KEPALA SUBBAGIAN PEMBAKUAN	9	4.522.500
77	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
78	KEPALA BAGIAN PENGADAAN	12	8.210.250
79	KEPALA SUBBAGIAN HARGA DAN MUTU	9	4.522.500
80	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN	9	4.522.500
81	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENGADAAN	9	4.522.500
82	KEPALA BAGIAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN	12	8.210.250
83	KEPALA SUBBAGIAN PENYIMPANAN	9	4.522.500
84	KEPALA SUBBAGIAN PENYALURAN	9	4.522.500
85	KEPALA SUBBAGIAN PEMELIHARAAN	9	4.522.500
86	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	12	8.210.250
87	KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN	9	4.522.500
88	KEPALA SUBBAGIAN INVENTARISASI	9	4.522.500
89	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
90	KEPALA BAGIAN PENGHAPUSAN	12	8.210.250
91	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
92	KEPALA SUBBAGIAN PENETAPAN STATUS BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
93	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
94	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	15	15.997.500
95	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	12	8.210.250
96	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN NEGARA	9	4.522.500
97	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	9	4.522.500
98	KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12	8.210.250



NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
99	KEPALA SUBBAGIAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN BERITA	9	4.522.500
100	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN PERS DAN MEDIA MASSA	9	4.522.500
101	KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN	9	4.522.500
102	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	8.210.250
103	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA BADAN-BADAN INTERNASIONAL	9	4.522.500
104	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA	9	4.522.500
105	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
106	KEPALA BAGIAN FASILITASI DAN PENGADUAN MASALAH HUKUM	12	8.210.250
107	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN DUKUNGAN TEKNIS MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS	9	4.522.500
108	KEPALA SUBBAGIAN PENGADUAN MASALAH HUKUM	9	4.522.500
109	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
110	KEPALA BIRO UMUM	15	15.997.500
111	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN	12	8.210.250
112	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9	4.522.500
113	KEPALA SUBBAGIAN PEMBIMBINGAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	9	4.522.500
114	KEPALA SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN LAYANAN ARSIP INAKTIF	9	4.522.500
115	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	12	8.210.250
116	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
117	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL	9	4.522.500
118	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	9	4.522.500
119	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI	9	4.522.500
120	KEPALA BAGIAN BINA SIKAP MENTAL	12	8.210.250
121	KEPALA SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN	9	4.522.500
122	KEPALA SUBBAGIAN BIMBINGAN ROHANI PEGAWAI	9	4.522.500
123	KEPALA SUBBAGIAN PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI	9	4.522.500
124	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	12	8.210.250
125	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	9	4.522.500
126	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	9	4.522.500
127	KEPALA SUBBAGIAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA	9	4.522.500
128	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	4.522.500
129	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN	12	8.210.250
130	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	9	4.522.500
131	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	9	4.522.500
132	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN PIMPINAN	9	4.522.500
133	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN, INSTALASI, DOKUMEN, DAN JALUR INFORMASI	9	4.522.500
134	KEPALA PUSAT PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	15	15.997.500
135	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
136	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
137	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
138	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500
139	KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
140	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
141	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
142	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN	12	8.210.250
143	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN ANALISA KEBIJAKAN	9	4.522.500
144	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	9	4.522.500
145	KEPALA SUBBIDANG DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN	9	4.522.500
146	INSPEKTUR JENDERAL	17	27.577.500
147	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15	15.997.500
148	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
149	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
150	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
151	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
152	KEPALA BAGIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN I	12	8.210.250
153	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I.1	9	4.522.500
154	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I.2	9	4.522.500
155	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I.3	9	4.522.500
156	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN I.4	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
157	KEPALA BAGIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN II	12	8.210.250
158	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II.1	9	4.522.500
159	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II.2	9	4.522.500
160	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II.3	9	4.522.500
161	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN II.4	9	4.522.500
162	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
163	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9	4.522.500
164	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500
165	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
166	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500
167	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
168	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
169	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PROMOSI	9	4.522.500
170	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9	4.522.500
171	INSPEKTUR WILAYAH I	15	15.997.500
172	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH I	9	4.522.500
173	INSPEKTUR WILAYAH II	15	15.997.500
174	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH II	9	4.522.500
175	INSPEKTUR WILAYAH III	15	15.997.500
176	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH III	9	4.522.500
177	INSPEKTUR WILAYAH IV	15	15.997.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
178	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH IV	9	4.522.500
179	INSPEKTUR WILAYAH V	15	15.997.500
180	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH V	9	4.522.500
181	INSPEKTUR WILAYAH VI	15	15.997.500
182	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH VI	9	4.522.500
183	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI	17	27.577.500
184	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15	15.997.500
185	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
186	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
187	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4.522.500
188	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
189	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
190	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
191	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
192	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	4.522.500
193	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN	9	4.522.500
194	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
195	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
196	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
197	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
198	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN RUMAH TANGGA	12	8.210.250
199	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
200	KEPALA SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
201	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
202	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
203	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	8.210.250
204	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
205	KEPALA SUBBAGIAN TATA PERSURATAN, DOKUMENTASI DAN KEPUSTAKAAN	9	4.522.500
206	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
207	DIREKTUR DOKUMEN PERJALANAN VISA DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
208	KEPALA SUBDIREKTORAT SURAT PERJALANAN	12	8.210.250
209	KEPALA SEKSI PELAYANAN PASPOR BIASA	9	4.522.500
210	KEPALA SEKSI ANALISA PEMBERIAN PASPOR BIASA	9	4.522.500
211	KEPALA SUBDIREKTORAT SURAT PERJALANAN KHUSUS TENAGA KERJA INDONESIA	12	8.210.250
212	KEPALA SEKSI PELAYANAN PASPOR TENAGA KERJA INDONESIA	9	4.522.500
213	KEPALA SEKSI ANALISA PEMBERIAN PASPOR TENAGA KERJA INDONESIA	9	4.522.500
214	KEPALA SUBDIREKTORAT VISA	12	8.210.250
215	KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN	9	4.522.500
216	KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
217	KEPALA SEKSI VISA TINGGAL TERBATAS	9	4.522.500
218	KEPALA SEKSI VISA UNTUK NEGARA TERTENTU	9	4.522.500
219	KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN MASUK, BERTOLAK DAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	12	8.210.250
220	KEPALA SEKSI IZIN MASUK	9	4.522.500
221	KEPALA SEKSI IZIN BERTOLAK	9	4.522.500
222	KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DAN POS LINTAS BATAS	9	4.522.500
223	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITAS KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
224	KEPALA SEKSI LAYANAN KEAGAMAAN	9	4.522.500
225	KEPALA SEKSI LAYANAN PENDARATAN DI ATAS ALAT ANGKUT	9	4.522.500
226	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
227	DIREKTUR IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
228	KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN TINGGAL	12	8.210.250
229	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KUNJUNGAN	9	4.522.500
230	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TERBATAS	9	4.522.500
231	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TETAP	9	4.522.500
232	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KHUSUS DAN DARURAT	9	4.522.500
233	KEPALA SUBDIREKTORAT ALIH STATUS KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
234	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS	9	4.522.500
235	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IJIN TINGGAL TETAP	9	4.522.500
236	KEPALA SUBDIREKTORAT PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN DAN KEWARGANEGARAAN	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
237	KEPALA SEKSI PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
238	KEPALA SEKSI SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
239	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
240	DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
241	KEPALA SUBDIREKTORAT OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
242	KEPALA SEKSI PENGAWASAN ORANG ASING	9	4.522.500
243	KEPALA SEKSI OPERASI KEWILAYAHAN	9	4.522.500
244	KEPALA SEKSI PENGALANGAN	9	4.522.500
245	KEPALA SUBDIREKTORAT PRODUKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
246	KEPALA SEKSI LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI INTELIJEN	9	4.522.500
247	KEPALA SEKSI PRODUKSI PERKIRAAN INTELIJEN	9	4.522.500
248	KEPALA SEKSI PRODUKSI KEGIATAN INTELIJEN	9	4.522.500
249	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
250	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LEMBAGA INTELIJEN	9	4.522.500
251	KEPALA SEKSI BIMBINGAN JARINGAN NON LEMBAGA	9	4.522.500
252	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN PERIZINAN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
253	KEPALA SEKSI PENGAMANAN KANTOR DAN INSTALASI VITAL	9	4.522.500
254	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERSONIL, MATERIAL DAN DOKUMEN	9	4.522.500
255	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERIZINAN	9	4.522.500
256	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500



NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
257	DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
258	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
259	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH I	9	4.522.500
260	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH II	9	4.522.500
261	KEPALA SEKSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	4.522.500
262	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
263	KEPALA SEKSI PENINDAKAN WILAYAH I	9	4.522.500
264	KEPALA SEKSI PENINDAKAN WILAYAH II	9	4.522.500
265	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN	12	8.210.250
266	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9	4.522.500
267	KEPALA SEKSI PENANGKALAN	9	4.522.500
268	KEPALA SUBDIREKTORAT DETENSI IMIGRASI DAN DEPORTASI	12	8.210.250
269	KEPALA SEKSI DETENSI IMIGRASI	9	4.522.500
270	KEPALA SEKSI DEPORTASI	9	4.522.500
271	KEPALA SEKSI IMIGRAN ILEGAL	9	4.522.500
272	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
273	DIREKTUR LINTAS BATAS DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
274	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PERBATASAN	12	8.210.250
275	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERBATASAN MALAYSIA DAN PHILIPINA	9	4.522.500
276	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERBATASAN SINGAPURA, PAPUA NEW GUINEA DAN TIMOR LESTE	9	4.522.500
277	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA ORGANISASI INTERNASIONAL	12	8.210.250
278	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
279	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	4.522.500
280	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA ANTAR NEGARA	12	8.210.250
281	KEPALA SEKSI KERJASAMA BILATERAL	9	4.522.500
282	KEPALA SEKSI KERJASAMA MULTILATERAL	9	4.522.500
283	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PERWAKILAN	12	8.210.250
284	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILAN ASING	9	4.522.500
285	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILAN AMERIKA DAN EROPA	9	4.522.500
286	KEPALA SEKSI KERJA SAMA PERWAKILAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	9	4.522.500
287	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
288	DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	15	15.997.500
289	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGAMANAN	12	8.210.250
290	KEPALA SEKSI PERENCANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
291	KEPALA SEKSI PENGAMANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
292	KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN DOKUMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
293	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAPORAN DAN PEMELIHARAAN	12	8.210.250
294	KEPALA SEKSI PELAPORAN	9	4.522.500
295	KEPALA SEKSI PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
296	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
297	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
298	KEPALA SEKSI KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
299	KEPALA SEKSI PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
300	KEPALA SUBDIREKTORAT DOKUMEN KEIMIGRASIAN DAN KARTU ELEKTRONIK	12	8.210.250
301	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN DISTRIBUSI DOKUMEN	9	4.522.500
302	KEPALA SEKSI PELAYANAN KARTU ELEKTRONIK	9	4.522.500
303	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN KUALITAS DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
304	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
305	DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	17	27.577.500
306	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	15	15.997.500
307	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
308	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
309	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
310	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ORGANISASI	9	4.522.500
311	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
312	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
313	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
314	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	4.522.500
315	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
316	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
317	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
318	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
319	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	12	8.210.250
320	KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN DAN ANALISA KEBUTUHAN	9	4.522.500
321	KEPALA SUBBAGIAN INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN	9	4.522.500
322	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
323	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP	9	4.522.500
324	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
325	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
326	DIREKTUR BINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	15	15.997.500
327	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN EVALUASI	12	8.210.250
328	KEPALA SEKSI STANDARDISASI SARANA	9	4.522.500
329	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUNIAN	9	4.522.500
330	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN	12	8.210.250
331	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN INTELIJEN	9	4.522.500
332	KEPALA SEKSI PENINDAKAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9	4.522.500
333	KEPALA SUBDIREKTORAT KODE ETIK PROFESI	12	8.210.250
334	KEPALA SEKSI PENGAWASAN INTERNAL	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
335	KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM	9	4.522.500
336	KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS KEAMANAN	9	4.522.500
337	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN PENGADUAN	12	8.210.250
338	KEPALA SEKSI PENERIMAAN DAN KLARIFIKASI PENGADUAN	9	4.522.500
339	KEPALA SEKSI INVESTIGASI	9	4.522.500
340	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9	4.522.500
341	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
342	DIREKTUR BINA KESEHATAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA DAN TAHANAN	15	15.997.500
343	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN MAKANAN	12	8.210.250
344	KEPALA SEKSI GIZI	9	4.522.500
345	KEPALA SEKSI BAHAN MAKANAN	9	4.522.500
346	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA MAKANAN	9	4.522.500
347	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KESEHATAN	12	8.210.250
348	KEPALA SEKSI STANDARDISASI KESEHATAN	9	4.522.500
349	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	9	4.522.500
350	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	9	4.522.500
351	KEPALA SEKSI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9	4.522.500
352	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYAKIT MENULAR DAN KETERGANTUNGAN NAPZA	12	8.210.250
353	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
354	KEPALA SEKSI REHABILITASI MEDIK	9	4.522.500
355	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL	9	4.522.500
356	KEPALA SUBDIREKTORAT PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN DAN RESIKO TINGGI	12	8.210.250
357	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN	9	4.522.500
358	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KELOMPOK RESIKO TINGGI	9	4.522.500
359	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN DAN PERAWATAN	9	4.522.500
360	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
361	DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	15	15.997.500
362	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI ANAK DAN KLIEN DEWASA	12	8.210.250
363	KEPALA SEKSI REGISTRASI ANAK	9	4.522.500
364	KEPALA SEKSI REGISTRASI KLIEN DEWASA	9	4.522.500
365	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	9	4.522.500
366	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN	12	8.210.250
367	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN FORMAL DAN KEPUSTAKAAN	9	4.522.500
368	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN DAN LAYANAN KHUSUS	9	4.522.500
369	KEPALA SEKSI TENAGA INSTRUKTUR	9	4.522.500
370	KEPALA SUBDIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK	12	8.210.250
371	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
372	KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM	9	4.522.500
373	KEPALA SEKSI KONSULTASI DAN FASILITATOR	9	4.522.500
374	KEPALA SUBDIREKTORAT BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KLIEN DEWASA	12	8.210.250
375	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9	4.522.500
376	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KETERAMPILAN DAN PENYALURAN KERJA	9	4.522.500
377	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN	9	4.522.500
378	KEPALA SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN KEMASYARAKATAN	12	8.210.250
379	KEPALA SEKSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN ANAK	9	4.522.500
380	KEPALA SEKSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN KLIEN DEWASA	9	4.522.500
381	KEPALA SEKSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	9	4.522.500
382	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
383	DIREKTUR BINA PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN	15	15.997.500
384	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI	12	8.210.250
385	KEPALA SEKSI PENERIMAAN DAN PENILAIAN	9	4.522.500
386	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DAN PENEMPATAN	9	4.522.500
387	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN	9	4.522.500
388	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN	12	8.210.250
389	KEPALA SEKSI PENGAMANAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
390	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN	9	4.522.500
391	KEPALA SEKSI BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN	9	4.522.500
392	KEPALA SUBDIREKTORAT MUTASI DAN PENGHAPUSAN	12	8.210.250
393	KEPALA SEKSI MUTASI	9	4.522.500
394	KEPALA SEKSI PENGHAPUSAN	9	4.522.500
395	KEPALA SEKSI PENGAWASAN BASAN DAN BARAN	9	4.522.500
396	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
397	DIREKTUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI	15	15.997.500
398	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	12	8.210.250
399	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
400	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM DATABASE	9	4.522.500
401	KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN	9	4.522.500
402	KEPALA SUBDIREKTORAT KOMUNIKASI	12	8.210.250
403	KEPALA SEKSI ANALISA DAN STRATEGI KOMUNIKASI	9	4.522.500
404	KEPALA SEKSI PELIPUTAN DAN PENYAJIAN BERITA	9	4.522.500
405	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	4.522.500
406	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA	12	8.210.250
407	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI	9	4.522.500
408	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LUAR NEGERI	9	4.522.500
409	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500



NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
410	DIREKTUR BINA NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN	15	15.997.500
411	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	12	8.210.250
412	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI TAHANAN	9	4.522.500
413	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA	9	4.522.500
414	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PELAYANAN TAHANAN	9	4.522.500
415	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN DAN BANTUAN HUKUM	12	8.210.250
416	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9	4.522.500
417	KEPALA SEKSI BANTUAN HUKUM	9	4.522.500
418	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN HUKUM	9	4.522.500
419	KEPALA SUBDIREKTORAT INTEGRASI DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	12	8.210.250
420	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
421	KEPALA SEKSI ADMISI ORIENTASI DAN ASIMILASI	9	4.522.500
422	KEPALA SEKSI INTEGRASI UMUM	9	4.522.500
423	KEPALA SEKSI INTEGRASI KHUSUS	9	4.522.500
424	KEPALA SUBDIREKTORAT BIMBINGAN KEMANDIRIAN	12	8.210.250
425	KEPALA SEKSI BIMBINGAN LATIHAN KETERAMPILAN	9	4.522.500
426	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA INDUSTRI DAN JASA	9	4.522.500
427	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	9	4.522.500
428	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA PERIKANAN DAN PETERNAKAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
429	KEPALA SUBDIREKTORAT BIMBINGAN KEPRIBADIAN	12	8.210.250
430	KEPALA SEKSI KEAGAMAAN	9	4.522.500
431	KEPALA SEKSI OLAHRAGA DAN KESENIAN	9	4.522.500
432	KEPALA SEKSI BIMBINGAN INTELEKTUAL DAN KESADARAN BERNEGARA	9	4.522.500
433	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
434	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17	27.577.500
435	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	15	15.997.500
436	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
437	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
438	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
439	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
440	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
441	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
442	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	4.522.500
443	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	4.522.500
444	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
445	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
446	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
447	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
448	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
449	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500
450	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
451	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS	9	4.522.500
452	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
453	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	12	8.210.250
454	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9	4.522.500
455	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI	9	4.522.500
456	KEPALA SUBBAGIAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	9	4.522.500
457	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
458	DIREKTUR PERDATA	15	15.997.500
459	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM	12	8.210.250
460	KEPALA SEKSI PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI KEPERDATAAN	9	4.522.500
461	KEPALA SEKSI LEGALISASI	9	4.522.500
462	KEPALA SEKSI ADVOKAT ASING DAN PENTERJEMAH RESMI TERSUMPAH	9	4.522.500
463	KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASI PERDATA UMUM	9	4.522.500
464	KEPALA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM	12	8.210.250
465	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERTUTUP	9	4.522.500
466	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERBUKA, LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL	9	4.522.500
467	KEPALA SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	9	4.522.500
468	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PENGUMUMAN BADAN HUKUM	9	4.522.500
469	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDAFTARAN FIDUSIA	12	8.210.250
470	KEPALA SEKSI PENERIMAAN DAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PEMROSESAN		
471	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN FIDUSIA	9	4.522.500
472	KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASI FIDUSIA	9	4.522.500
473	KEPALA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN	12	8.210.250
474	KEPALA SEKSI BALAI HARTA PENINGGALAN	9	4.522.500
475	KEPALA SEKSI DAFTAR WASIAT	9	4.522.500
476	KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASI HARTA PENINGGALAN	9	4.522.500
477	KEPALA SUBDIREKTORAT NOTARIAT	12	8.210.250
478	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN NOTARIS	9	4.522.500
479	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS	9	4.522.500
480	KEPALA SEKSI ARSIP DAN DOKUMENTASI NOTARIAT	9	4.522.500
481	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
482	DIREKTUR PIDANA	15	15.997.500
483	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI	12	8.210.250
484	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA UMUM	9	4.522.500
485	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA KHUSUS DAN GRASI	9	4.522.500
486	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUKUM PIDANA	12	8.210.250
487	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUKUM PIDANA UMUM	9	4.522.500
488	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI HUKUM PIDANA KHUSUS	9	4.522.500
489	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
490	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN, PEMUTASIAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	4.522.500
491	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	4.522.500
492	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
493	DIREKTUR TATA NEGARA	15	15.997.500
494	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM TATA NEGARA	12	8.210.250
495	KEPALA SEKSI ANALISA DAN PERTIMBANGAN HUKUM	9	4.522.500
496	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN EVALUASI DATA PARTAI POLITIK	9	4.522.500
497	KEPALA SEKSI PENDAFTARAN PARTAI POLITIK	9	4.522.500
498	KEPALA SUBDIREKTORAT PEWARGANEGARAAN	12	8.210.250
499	KEPALA SEKSI ANALISA DAN PERTIMBANGAN PEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
500	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
501	KEPALA SUBDIREKTORAT KEWARGANEGARAAN	12	8.210.250
502	KEPALA SEKSI PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
503	KEPALA SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
504	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA KEWARGANEGARAAN	9	4.522.500
505	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
506	DIREKTUR HUKUM INTERNASIONAL DAN OTORITAS PUSAT	15	15.997.500
507	KEPALA SUBDIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM HUMANITER	12	8.210.250
508	KEPALA SEKSI HUKUM HUMANITER	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
509	KEPALA SEKSI EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	9	4.522.500
510	KEPALA SEKSI BANTUAN HUKUM DAN TIMBAL BALIK	9	4.522.500
511	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM EKONOMI, PERDATA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	12	8.210.250
512	KEPALA SEKSI HUKUM EKONOMI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	9	4.522.500
513	KEPALA SEKSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	9	4.522.500
514	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM LAUT, UDARA DAN LINGKUNGAN	12	8.210.250
515	KEPALA SEKSI HUKUM LAUT	9	4.522.500
516	KEPALA SEKSI HUKUM UDARA DAN ANGKASA	9	4.522.500
517	KEPALA SEKSI HUKUM LINGKUNGAN	9	4.522.500
518	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
519	DIREKTUR DAKTILOSKOPI	15	15.997.500
520	KEPALA SUBDIREKTORAT PERUMUSAN DAN IDENTIFIKASI	12	8.210.250
521	KEPALA SEKSI PERUMUSAN	9	4.522.500
522	KEPALA SEKSI IDENTIFIKASI	9	4.522.500
523	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	12	8.210.250
524	KEPALA SEKSI PENGUMPULAN DATA	9	4.522.500
525	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
526	KEPALA SUBDIREKTORAT DOKUMENTASI DAN ARSIP	12	8.210.250
527	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	4.522.500
528	KEPALA SEKSI ARSIP	9	4.522.500
529	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
530	DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	17	27.577.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
531	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	15.997.500
532	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
533	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
534	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
535	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ORGANISASI	9	4.522.500
536	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
537	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
538	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	4.522.500
539	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9	4.522.500
540	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
541	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
542	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
543	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
544	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
545	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
546	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
547	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL	9	4.522.500
548	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN	9	4.522.500
549	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	8.210.250
550	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
551	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
552	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	4.522.500
553	DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	15	15.997.500
554	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	8.210.250
555	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9	4.522.500
556	KEPALA SEKSI PUBLIKASI	9	4.522.500
557	KEPALA SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI DAN PEMERIKSAAN	12	8.210.250
558	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	4.522.500
559	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN	9	4.522.500
560	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI, MUTASI DAN LISENSI	12	8.210.250
561	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	4.522.500
562	KEPALA SEKSI MUTASI DAN LISENSI	9	4.522.500
563	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM	12	8.210.250
564	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	4.522.500
565	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KOMISI BANDING DAN DEWAN HAK CIPTA	9	4.522.500
566	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
567	DIREKTUR PATEN	15	15.997.500
568	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	8.210.250
569	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9	4.522.500
570	KEPALA SEKSI PUBLIKASI	9	4.522.500



NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
571	KEPALA SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN	12	8.210.250
572	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI	9	4.522.500
573	KEPALA SEKSI PENELUSURAN	9	4.522.500
574	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN	12	8.210.250
575	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	4.522.500
576	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI, PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	12	8.210.250
577	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	4.522.500
578	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	9	4.522.500
579	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM	12	8.210.250
580	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	4.522.500
581	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KOMISI BANDING	9	4.522.500
582	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
583	DIREKTUR MEREK	15	15.997.500
584	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	8.210.250
585	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN PERMOHONAN	9	4.522.500
586	KEPALA SEKSI PUBLIKASI	9	4.522.500
587	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI	9	4.522.500
588	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN	12	8.210.250
589	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	4.522.500
590	KEPALA SUBDIREKTORAT INDIKASI GEOGRAFIS	12	8.210.250
591	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN	9	4.522.500
592	KEPALA SEKSI EVALUASI TEKNIS	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
593	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI , PERPANJANGAN, MUTASI DAN LISENSI	12	8.210.250
594	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	4.522.500
595	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN, MUTASI DAN LISENSI	9	4.522.500
596	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM	12	8.210.250
597	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	4.522.500
598	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KOMISI BANDING	9	4.522.500
599	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
600	DIREKTUR KERJA SAMA DAN PROMOSI	15	15.997.500
601	KEPALA SUBDIREKTORAT PROMOSI	12	8.210.250
602	KEPALA SEKSI PENYIAPAN MATERI PROMOSI	9	4.522.500
603	KEPALA SEKSI PROMOSI DAN SOSIALISASI	9	4.522.500
604	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	8.210.250
605	KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL	9	4.522.500
606	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL	9	4.522.500
607	KEPALA SEKSI KERJA SAMA MULTILATERAL	9	4.522.500
608	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI	12	8.210.250
609	KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI PEMERINTAH	9	4.522.500
610	KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI NON PEMERINTAH	9	4.522.500
611	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
612	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15	15.997.500
613	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
614	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATABASE	9	4.522.500
615	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	9	4.522.500
616	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDUKUNG SISTEM	12	8.210.250
617	KEPALA SEKSI LAYANAN KELUHAN DAN PEMELIHARAAN	9	4.522.500
618	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN	9	4.522.500
619	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PROSES	12	8.210.250
620	KEPALA SEKSI PROSES KERJA TEKNOLOGI INFORMASI	9	4.522.500
621	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SITUS INTERNET	9	4.522.500
622	KEPALA SUBDIREKTORAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN	12	8.210.250
623	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	9	4.522.500
624	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI PATEN	9	4.522.500
625	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI MEREK	9	4.522.500
626	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN	9	4.522.500
627	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
628	DIREKTUR PENYIDIKAN	15	15.997.500
629	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGADUAN	12	8.210.250
630	KEPALA SEKSI PENERIMAAN PENGADUAN	9	4.522.500
631	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENYIDIKAN	9	4.522.500
632	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PEMANTAUAN	12	8.210.250
633	KEPALA SEKSI PENINDAKAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
634	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN	9	4.522.500
635	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
636	DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	17	27.577.500
637	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
638	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
639	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
640	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
641	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
642	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
643	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
644	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI	9	4.522.500
645	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	4.522.500
646	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
647	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
648	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
649	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
650	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
651	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500
652	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
653	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS	9	4.522.500
654	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	12	8.210.250
655	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEARSIPAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
656	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	9	4.522.500
657	KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	9	4.522.500
658	DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	15	15.997.500
659	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH I	12	8.210.250
660	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH I	9	4.522.500
661	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH I	9	4.522.500
662	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH II	12	8.210.250
663	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH II	9	4.522.500
664	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH II	9	4.522.500
665	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH III	12	8.210.250
666	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH III	9	4.522.500
667	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH III	9	4.522.500
668	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI KHUSUS	12	8.210.250
669	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK	9	4.522.500
670	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500
671	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
672	DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
673	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	8.210.250
674	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTAR NEGARA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
675	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BADAN-BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	4.522.500
676	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	4.522.500
677	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI	12	8.210.250
678	KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI PEMERINTAH	9	4.522.500
679	KEPALA SEKSI KERJA SAMA INSTITUSI NON PEMERINTAH	9	4.522.500
680	KEPALA SUBDIREKTORAT LEGISLASI DAN HARMONISASI HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
681	KEPALA SEKSI TELAAHAN NASKAH AKADEMIK	9	4.522.500
682	KEPALA SEKSI LEGISLASI	9	4.522.500
683	KEPALA SEKSI HARMONISASI	9	4.522.500
684	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
685	KEPALA SEKSI KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	4.522.500
686	KEPALA SEKSI KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500
687	KEPALA SEKSI KONVENSI	9	4.522.500
688	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
689	DIREKTUR DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
690	KEPALA SUBDIREKTORAT PROGRAM DISEMINASI	12	8.210.250
691	KEPALA SEKSI METODOLOGI DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
692	KEPALA SEKSI BAHAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
693	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBUDAYAAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
694	KEPALA SEKSI APARATUR NEGARA	9	4.522.500
695	KEPALA SEKSI MASYARAKAT	9	4.522.500
696	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYULUHAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
697	KEPALA SEKSI PENYIAPAN PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
698	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
699	KEPALA SUBDIREKTORAT EVALUASI DAN PENGEMBANGAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
700	KEPALA SEKSI EVALUASI DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
701	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
702	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
703	DIREKTUR PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
704	KEPALA SUBDIREKTORAT PROGRAM DAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
705	KEPALA SEKSI PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
706	KEPALA SEKSI BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
707	KEPALA SEKSI FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
708	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
709	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	12	8.210.250
710	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I		
711	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	9	4.522.500
712	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	12	8.210.250
713	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	9	4.522.500
714	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	9	4.522.500
715	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	12	8.210.250
716	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	9	4.522.500
717	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	9	4.522.500
718	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
719	DIREKTUR INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
720	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
721	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI WILAYAH I	9	4.522.500
722	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI WILAYAH II	9	4.522.500
723	KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI WILAYAH III	9	4.522.500
724	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM DAN JARINGAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
725	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM DAN JARINGAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500



NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
726	KEPALA SEKSI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM DAN JARINGAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
727	KEPALA SEKSI JEJARING INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
728	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
729	KEPALA SEKSI PUBLIKASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
730	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
731	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
732	KEPALA SUBDIREKTORAT EVALUASI DAN PELAPORAN HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
733	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN WILAYAH I	9	4.522.500
734	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN WILAYAH II	9	4.522.500
735	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
736	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17	27.577.500
737	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
738	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
739	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
740	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN PELAPORAN	9	4.522.500
741	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
742	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
743	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	4.522.500
744	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
745	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
746	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	9	4.522.500
747	KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN	12	8.210.250
748	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
749	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN	9	4.522.500
750	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
751	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9	4.522.500
752	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
753	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
754	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
755	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	12	8.210.250
756	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI RANCANGAN UNDANG- UNDANG	9	4.522.500
757	KEPALA SEKSI PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG	9	4.522.500
758	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RANCANAGAN PERATURAN Pemerintah, Peraturan Presiden DAN PERATURAN MENTERI	12	8.210.250
759	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN I	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
760	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN II	9	4.522.500
761	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	12	8.210.250
762	KEPALA SEKSI PENYIAPAN BAHAN DAN DATA	9	4.522.500
763	KEPALA SEKSI PENYELENGARAAN PEMBAHASAN	9	4.522.500
764	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250
765	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
766	KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	4.522.500
767	KEPALA SUBDIREKTORAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN	12	8.210.250
768	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	4.522.500
769	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN HUKUM	9	4.522.500
770	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
771	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
772	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	12	8.210.250
773	KEPALA SEKSI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN I	9	4.522.500
774	KEPALA SEKSI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN II	9	4.522.500
775	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN	12	8.210.250
776	KEPALA SEKSI KEUANGAN DAN PERBANKAN I	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
777	KEPALA SEKSI KEUANGAN DAN PERBANKAN II	9	4.522.500
778	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN RISET DAN TEKNOLOGI	12	8.210.250
779	KEPALA SEKSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI I	9	4.522.500
780	KEPALA SEKSI INDUSTRI, PERDAGANGAN, RISET DAN TEKNOLOGI II	9	4.522.500
781	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	8.210.250
782	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT I	9	4.522.500
783	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT II	9	4.522.500
784	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
785	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PUBLIKASI, DAN KERJA SAMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
786	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI	12	8.210.250
787	KEPALA SEKSI PENERBITAN	9	4.522.500
788	KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PENYEBARLUASAN	9	4.522.500
789	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA	12	8.210.250
790	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	9	4.522.500
791	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250
792	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENGUNDANGAN	9	4.522.500
793	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	4.522.500
794	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
795	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATABASE	9	4.522.500
796	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SISTEM INFORMASI	9	4.522.500
797	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
798	DIREKTUR LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	15.997.500
799	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN I	12	8.210.250
800	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH	9	4.522.500
801	KEPALA SEKSI KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	9	4.522.500
802	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI BAHAN DAN ANALISA	12	8.210.250
803	KEPALA SEKSI PENYIAPAN BAHAN DAN DATA	9	4.522.500
804	KEPALA SEKSI ANALISA, PELAPORAN DAN DOKUMENTASI	9	4.522.500
805	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN II	12	8.210.250
806	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH DAN MONITORING	9	4.522.500
807	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
808	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	15	15.997.500
809	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMETAAN DAN PUBLIKASI PERATURAN DAERAH	12	8.210.250
810	KEPALA SEKSI PEMETAAN DAN INVENTARISASI PERATURAN DAERAH	9	4.522.500
811	KEPALA SEKSI PUBLIKASI PERATURAN DAERAH	9	4.522.500
812	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH I	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
813	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAH I.1	9	4.522.500
814	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAH I.2	9	4.522.500
815	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH II	12	8.210.250
816	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAH II	9	4.522.500
817	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH WILAYAH III	12	8.210.250
818	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERATURAN DAERAH WILAYAH III	9	4.522.500
819	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
820	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17	27.577.500
821	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
822	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA	12	8.210.250
823	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
824	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
825	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA	9	4.522.500
826	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
827	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
828	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	4.522.500
829	KEPALA SUBBAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	9	4.522.500
830	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
831	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
832	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
833	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
834	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
835	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
836	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
837	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	4.522.500
838	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN	15	15.997.500
839	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	8.210.250
840	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9	4.522.500
841	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	4.522.500
842	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	8.210.250
843	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	4.522.500
844	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	4.522.500
845	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
846	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	4.522.500
847	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	4.522.500
848	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNIS	15	15.997.500
849	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
850	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9	4.522.500
851	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	4.522.500
852	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	8.210.250
853	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	4.522.500
854	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	4.522.500
855	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
856	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	4.522.500
857	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	4.522.500
858	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
859	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	8.210.250
860	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9	4.522.500
861	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	4.522.500
862	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	8.210.250
863	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	4.522.500
864	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	4.522.500
865	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	8.210.250
866	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	4.522.500
867	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	4.522.500
868	DIREKTUR AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN	13	9.277.500
869	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	9	4.522.500
870	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
871	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000



NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
872	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	8	3.930.000
873	KEPALA SUBBAGIAN AKADEMI DAN KETARUNAAN	9	4.522.500
874	KEPALA URUSAN ADMINISTARSI AKADEMIK	8	3.930.000
875	KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KETARUNAAN	8	3.930.000
876	DIREKTUR AKADEMI IMIGRASI	13	9.277.500
877	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	9	4.522.500
878	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
879	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
880	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	8	3.930.000
881	KEPALA SUBBAGIAN ADMNISTRASI AKADEMI DAN KETARUNAAN	9	4.522.500
882	KEPALA URUSAN ADMINISTRASI AKADEMIK	8	3.930.000
883	KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KETARUNAAN	8	3.930.000
884	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17	27.577.500
885	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15	15.997.500
886	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
887	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
888	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	4.522.500
889	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
890	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
891	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
892	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	4.522.500
893	KEPALA SUBBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	4.522.500
894	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
895	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500
896	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	4.522.500
897	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
898	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
899	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEARSIPAN	9	4.522.500
900	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
901	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	4.522.500
902	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	12	8.210.250
903	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
904	KEPALA SUBBAGIAN PENYIMPANAN DAN PENYALURAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
905	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	4.522.500
906	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL	15	15.997.500
907	KEPALA BIDANG PENELITIAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM	12	8.210.250
908	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN KELEMBAGAAN HUKUM	9	4.522.500
909	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM	9	4.522.500
910	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN SUBSTANSI HUKUM	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
911	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN KEBUTUHAN HUKUM	9	4.522.500
912	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN HUKUM POSITIF	9	4.522.500
913	KEPALA BIDANG PENELITIAN BUDAYA HUKUM DAN MASYARAKAT	12	8.210.250
914	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT	9	4.522.500
915	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN HUKUM TIDAK TERTULIS	9	4.522.500
916	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HUKUM DAN FASILITASI PENELITIAN	12	8.210.250
917	KEPALA SUBBIDANG PERTEMUAN ILMIAH DAN KERJA SAMA PENELITIAN	9	4.522.500
918	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI HUKUM DAN PENELITIAN	9	4.522.500
919	KEPALA PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	15	15.997.500
920	KEPALA BIDANG RENCANA DAN FASILITASI PEMBANGUNAN HUKUM	12	8.210.250
921	KEPALA SUBBIDANG PENYIAPAN RENCANA PEMBANGUNAN HUKUM	9	4.522.500
922	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN KERJA SAMA HUKUM	9	4.522.500
923	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PERENCANAAN HUKUM	9	4.522.500
924	KEPALA BIDANG PERENCANAAN LEGISLASI	12	8.210.250
925	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL	9	4.522.500
926	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH	9	4.522.500
927	KEPALA BIDANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
928	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	4.522.500
929	KEPALA SUBBIDANG PEREKONOMIAN	9	4.522.500
930	KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15	15.997.500
931	KEPALA BIDANG OTOMASI DOKUMENTASI HUKUM	12	8.210.250
932	KEPALA SUBBIDANG SISTEM DAN JARINGAN ELEKTRONIK	9	4.522.500
933	KEPALA SUBBIDANG DATABASE DAN DOKUMENTASI HUKUM	9	4.522.500
934	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN HUKUM	12	8.210.250
935	KEPALA SUBBIDANG PENGUMPULAN KOLEKSI	9	4.522.500
936	KEPALA SUBBIDANG PEMELIHARAAN KOLEKSI	9	4.522.500
937	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN PEMUSTAKA	9	4.522.500
938	KEPALA BIDANG JARINGAN INFORMASI HUKUM	12	8.210.250
939	KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN JARINGAN INFORMASI	9	4.522.500
940	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI DAN PENGUATAN JARINGAN	9	4.522.500
941	KEPALA SUBBIDANG PENERBITAN DAN PUBLIKASI HUKUM	9	4.522.500
942	KEPALA PUSAT PENYULUHAN HUKUM	15	15.997.500
943	KEPALA BIDANG DESA SADAR HUKUM	12	8.210.250
944	KEPALA SUBBIDANG PEMETAAN DESA SADAR HUKUM	9	4.522.500
945	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DESA SADAR HUKUM	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
946	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI DESA SADAR HUKUM	9	4.522.500
947	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM	12	8.210.250
948	KEPALA SUBBIDANG METODE PENYULUHAN HUKUM	9	4.522.500
949	KEPALA SUBBIDANG PENYULUH HUKUM	9	4.522.500
950	KEPALA SUBBIDANG SARANA PENYULUHAN HUKUM	9	4.522.500
951	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM	12	8.210.250
952	KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN UNIT PELAYANAN HUKUM	9	4.522.500
953	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG	9	4.522.500
954	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM TIDAK LANGSUNG	9	4.522.500
955	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	17	27.577.500
956	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	15	15.997.500
957	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	8.210.250
958	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	4.522.500
959	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
960	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	8.210.250
961	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
962	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PENSIUN	9	4.522.500
963	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	8.210.250
964	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	4.522.500

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
965	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	9	4.522.500
966	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250
967	KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	9	4.522.500
968	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERJALANAN DINAS	9	4.522.500
969	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	9	4.522.500
970	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI	12	8.210.250
971	KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	9	4.522.500
972	KEPALA SUBBAGIAN DATA, INFORMASI DAN DOKUMENTASI	9	4.522.500
973	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	15	15.997.500
974	KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	12	8.210.250
975	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENELITIAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	9	4.522.500
976	KEPALA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENELITIAN HAK-HAK POLITIK DAN POLITIK	9	4.522.500
977	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	12	8.210.250
978	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
979	KEPALA SUBBIDANG SOSIALISASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
980	KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	12	8.210.250
981	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
982	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI PENERAPAN HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
983	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	15	15.997.500
984	KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	8.210.250
985	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500
986	KEPALA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENELITIAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	4.522.500
987	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	8.210.250
988	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
989	KEPALA SUBBIDANG SOSIALISASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
990	KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	8.210.250
991	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
992	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI PENERAPAN HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
993	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK	15	15.997.500
994	KEPALA BIDANG PENELITIAN TRANSFORMASI KONFLIK	12	8.210.250
995	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENELITIAN TRANSFORMASI KONFLIK	9	4.522.500
996	KEPALA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENELITIAN TRANSFORMASI KONFLIK	9	4.522.500
997	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TRANSFORMASI KONFLIK	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
998	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
999	KEPALA SUBBIDANG SOSIALISASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
1000	KEPALA BIDANG EVALUASI TRANSFORMASI KONFLIK	12	8.210.250
1001	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
1002	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI PENERAPAN HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
1003	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	15	15.997.500
1004	KEPALA BIDANG PENELITIAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	12	8.210.250
1005	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN PENELITIAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	9	4.522.500
1006	KEPALA SUBBIDANG PELAKSANAAN PENELITIAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	9	4.522.500
1007	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	12	8.210.250
1008	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
1009	KEPALA SUBBIDANG SOSIALISASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
1010	KEPALA BIDANG EVALUASI HAK-HAK KELOMPOK KHUSUS	12	8.210.250
1011	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
1012	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI PENERAPAN HASIL PENELITIAN	9	4.522.500
1013	KEPALA KANTOR WILAYAH	15	15.997.500
1014	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	14	14.160.000
1015	KEPALA BAGIAN UMUM	12	8.210.250



NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1016	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	9	4.522.500
1017	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500
1018	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN	12	8.210.250
1019	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9	4.522.500
1020	KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN LAPORAN	9	4.522.500
1021	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	14	14.160.000
1022	KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN PEMBINAAN	12	8.210.250
1023	KEPALA SUBBIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9	4.522.500
1024	KEPALA SUBBIDANG BIMBINGAN KEMASYARAKATAN, LATIHAN KERJA DAN PRODUKSI	9	4.522.500
1025	KEPALA BIDANG REGISTRASI, PERAWATAN DAN BINA KHUSUS NARKOTIKA	12	8.210.250
1026	KEPALA SUBBIDANG REGISTRASI DAN STATISTIK	9	4.522.500
1027	KEPALA SUBBIDANG PERAWATAN DAN BINA KHUSUS NARKOTIKA	9	4.522.500
1028	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN	14	14.160.000
1029	KEPALA BIDANG LALU LINTAS, IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	12	8.210.250
1030	KEPALA SUBBIDANG LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1031	KEPALA SUBBIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1032	KEPALA BIDANG INTELIJEN, PENINDAKAN DAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1033	KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1034	KEPALA SUBBIDANG SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1035	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14	14.160.000
1036	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM	12	8.210.250
1037	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM UMUM	9	4.522.500
1038	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	9	4.522.500
1039	KEPALA BIDANG HUKUM	12	8.210.250
1040	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN HUKUM	9	4.522.500
1041	KEPALA SUBBIDANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	9	4.522.500
1042	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA	12	8.210.250
1043	KEPALA SUBBIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
1044	KEPALA SUB BIDANG DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	4.522.500
1045	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I	14	14.160.000
1046	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	11	7.020.000
1047	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	7.020.000
1048	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
1049	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500
1050	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
1051	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NAPI	11	7.020.000
1052	KEPALA SEKSI REGISTRASI	9	4.522.500
1053	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1054	KEPALA SEKSI PERAWATAN NAPI	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1055	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA	11	7.020.000
1056	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA	9	4.522.500
1057	KEPALA SEKSI SARANA KERJA	9	4.522.500
1058	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA	9	4.522.500
1059	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	11	7.020.000
1060	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9	4.522.500
1061	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1062	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	12	8.210.250
1063	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1064	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1065	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	3.930.000
1066	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1067	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	9	4.522.500
1068	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1069	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	3.930.000
1070	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	4.522.500
1071	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	3.930.000
1072	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	3.930.000
1073	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1074	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000
1075	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	3.930.000
1076	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA NARKOTIKA	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1077	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1078	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1079	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	3.930.000
1080	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1081	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	9	4.522.500
1082	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1083	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	3.930.000
1084	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	4.522.500
1085	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	3.930.000
1086	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	3.930.000
1087	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1088	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000
1089	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	3.930.000
1090	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12	8.210.250
1091	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1092	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1093	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	3.930.000
1094	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1095	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	4.522.500
1096	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	3.930.000
1097	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NAPI/ANAK DIDIK	8	3.930.000
1098	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1099	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1100	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000
1101	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	3.930.000
1102	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA	12	8.210.250
1103	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	4.522.500
1104	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1105	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	3.930.000
1106	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1107	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	4.522.500
1108	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	3.930.000
1109	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NAPI/ANAK DIDIK	8	3.930.000
1110	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	3.930.000
1111	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	4.522.500
1112	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000
1113	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	3.930.000
1114	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III	10	5.197.500
1115	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	3.930.000
1116	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI	8	3.930.000
1117	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN	8	3.930.000
1118	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	8	3.930.000
1119	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I	12	8.210.250

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1120	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	9	4.522.500
1121	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	3.930.000
1122	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9	4.522.500
1123	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN	8	3.930.000
1124	KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN	8	3.930.000
1125	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	3.930.000
1126	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUTAN	9	4.522.500
1127	KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	3.930.000
1128	KEPALA SUBSEKSI UMUM	8	3.930.000
1129	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA	10	5.197.500
1130	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	8	3.930.000
1131	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	3.930.000
1132	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	3.930.000
1133	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUTAN	8	3.930.000
1134	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	10	5.197.500
1135	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	8	3.930.000
1136	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	3.930.000
1137	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUTAN	8	3.930.000
1138	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I	12	8.210.250
1139	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1140	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1141	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1142	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1143	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9	4.522.500
1144	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1145	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	3.930.000
1146	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	3.930.000
1147	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	9	4.522.500
1148	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1149	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	3.930.000
1150	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	3.930.000
1151	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II	10	5.197.500
1152	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	3.930.000
1153	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	8	3.930.000
1154	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	8	3.930.000
1155	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I	10	5.197.500
1156	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN	8	3.930.000
1157	KEPALA SUBSEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN RUPBASAN	8	3.930.000
1158	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II	10	5.197.500
1159	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN RUPBASAN	8	3.930.000
1160	KEPALA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA	10	5.197.500
1161	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN CABANG RUTAN	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1162	KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN	12	8.210.250
1163	SEKRETARIS BALAI HARTA PENINGGALAN	10	5.197.500
1164	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	9	4.522.500
1165	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II	9	4.522.500
1166	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III	9	4.522.500
1167	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1168	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1169	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1170	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1171	KEPALA URUSAN HARTA PENINGGALAN DAN KEPAILITAN	8	3.930.000
1172	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS	14	14.160.000
1173	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	7.020.000
1174	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9	4.522.500
1175	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500
1176	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11	7.020.000
1177	KEPALA SEKSI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1178	KEPALA SEKSI SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1179	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	11	7.020.000



NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1180	KEPALA SEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1181	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1182	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11	7.020.000
1183	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1184	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1185	KEPALA BIDANG PENDARATAN DAN IZIN MASUK	11	7.020.000
1186	KEPALA SEKSI UNIT A	10	5.197.500
1187	KEPALA SEKSI UNIT B	10	5.197.500
1188	KEPALA SEKSI UNIT C	10	5.197.500
1189	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I	12	8.210.250
1190	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1191	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI	8	3.930.000
1192	KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI	8	3.930.000
1193	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1194	KEPALA SUBSEKSI LINTAS BATAS	8	3.930.000
1195	KEPALA SUBSEKSI PERIZINAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1196	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1197	KEPALA SUBSEKSI PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1198	KEPALA SUBSEKSI PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1199	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1200	KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1201	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1202	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1203	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1204	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1205	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1206	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II	11	7.020.000
1207	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1208	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1209	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1210	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1211	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1212	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI	8	3.930.000
1213	KEPALA SUBSEKSI KOMUNIKASI	8	3.930.000
1214	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1215	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1216	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1217	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	4.522.500
1218	KEPALA SUBSEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1219	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1220	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III	10	5.197.500
1221	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	3.930.000
1222	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN STATUS KEIMIGRASIAN	8	3.930.000

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1223	KEPALA SUBSEKSI INSARKOM DAN WASDAK KEIMIGRASIAN	8	3.930.000
1224	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT	14	14.160.000
1225	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	7.020.000
1226	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	4.522.500
1227	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	4.522.500
1228	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	4.522.500
1229	KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN	11	7.020.000
1230	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
1231	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	4.522.500
1232	KEPALA SEKSI KESEHATAN	9	4.522.500
1233	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI	11	7.020.000
1234	KEPALA SEKSI PENEMPATAN	9	4.522.500
1235	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9	4.522.500
1236	KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI	9	4.522.500
1237	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI	12	8.210.250
1238	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	4.522.500
1239	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	3.930.000
1240	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	3.930.000
1241	KEPALA URUSAN UMUM	8	3.930.000
1242	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	4.522.500
1243	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	3.930.000
1244	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	8	3.930.000
1245	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN	9	4.522.500

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1246	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	3.930.000
1247	KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN	8	3.930.000
1248	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	9	4.522.500
1249	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	3.930.000
1250	KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN	8	3.930.000
1251	KEPALA RUMAH SAKIT	12	8.210.250
1252	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	4.522.500
1253	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9	4.522.500

**B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	PERANCANG PERATURAN PERUU		
	PERANCANG PERATURAN PERUU PERTAMA	8	3.930.000
	PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA	9	4.522.500
	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA	11	7.020.000
	PERANCANG PERATURAN PERUU UTAMA	13	9.277.500
2	PEMERIKSA PATEN AHLI		
	PEMERIKSA PATEN PERTAMA	8	3.930.000
	PEMERIKSA PATEN MUDA	9	4.522.500
	PEMERIKSA PATEN MADYA	11	7.020.000
	PEMERIKSA PATEN UTAMA	13	9.277.500

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
<b>3</b>	<b>PEMERIKSA MERK AHLI</b>		
	<b>PEMERIKSA MERK PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PEMERIKSA MERK MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PEMERIKSA MERK MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PEMERIKSA MERK UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>4</b>	<b>PEMERIKSA MERK TERAMPIL</b>		
	<b>PEMERIKSA MERK PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>PEMERIKSA MERK PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>PEMERIKSA MERK PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>5</b>	<b>DOKTER/SPELIALIS</b>		
	<b>DOKTER PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>DOKTER MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>DOKTER MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>DOKTER UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>6</b>	<b>DOKTER GIGI/SPELIALIS</b>		
	<b>DOKTER GIGI PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>DOKTER GIGI MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>DOKTER GIGI MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>DOKTER GIGI UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>7</b>	<b>PERAWAT GIGI</b>		
	<b>PERAWAT GIGI PEMULA</b>	<b>5</b>	<b>2.531.250</b>
	<b>PERAWAT GIGI PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>PERAWAT GIGI PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
<b>8</b>	<b>PERAWAT AHLI</b>		
	<b>PERAWAT PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PERAWAT MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PERAWAT MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PERAWAT UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>9</b>	<b>PERAWAT TERAMPIL</b>		
	<b>PERAWAT PEMULA</b>	<b>5</b>	<b>2.531.250</b>
	<b>PERAWAT PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>PERAWAT PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>10</b>	<b>ARSIPARIS AHLI</b>		
	<b>ARSIPARIS PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>ARSIPARIS MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>ARSIPARIS MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>ARSIPARIS UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>11</b>	<b>ARSIPARIS TERAMPIL</b>		
	<b>ARSIPARIS PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>ARSIPARIS PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>12</b>	<b>PUSTAKAWAN AHLI</b>		
	<b>PUSTAKAWAN PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PUSTAKAWAN MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PUSTAKAWAN MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PUSTAKAWAN UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
<b>13</b>	<b>PUSTAKAWAN TERAMPIL</b>		
	<b>PUSTAKAWAN PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>PUSTAKAWAN PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>14</b>	<b>WIDYAISARA</b>		
	<b>WIDYAISARA PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>WIDYAISARA MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>WIDYAISARA MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>WIDYAISARA UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>15</b>	<b>PENELITI</b>		
	<b>PENELITI PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PENELITI MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PPENELITI MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PENELITI UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>16</b>	<b>AUDITOR AHLI</b>		
	<b>AUDITOR PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>AUDITOR MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>AUDITOR MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>AUDITOR UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>17</b>	<b>AUDITOR TERAMPIL</b>		
	<b>AUDITOR PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>AUDITOR PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>18</b>	<b>PRANATA KOMPUTER AHLI</b>		
	<b>PRANATA KOMPUTER PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
	<b>PRANATA KOMPUTER MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PRANATA KOMPUTER MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PRANATA KOMPUTER UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>19</b>	<b>PRANATA KOMPUTER TERAMPIL</b>		
	<b>PRANATA KOMPUTER PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>PRANATA KOMPUTER PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>20</b>	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL</b>		
	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>21</b>	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI</b>		
	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>22</b>	<b>PSIKOLOG KLINIS AHLI</b>		
	<b>PSIKOLOG KLINIS PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PSIKOLOG KLINIS MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PSIKOLOG KLINIS MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PSIKOLOG KLINIS UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>23</b>	<b>PENERJEMAH AHLI</b>		
	<b>PENERJEMAH PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PENERJEMAH MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENERJEMAH MADYA	11	7.020.000
	PENERJEMAH UTAMA	13	9.277.500
24	PERENCANA AHLI		
	PERENCANA PERTAMA	8	3.930.000
	PERENCANA MUDA	9	4.522.500
	PERENCANA MADYA	11	7.020.000
	PERENCANA UTAMA	13	9.277.500
25	APOTEKER AHLI		
	APOTEKER PERTAMA	8	3.930.000
	APOTEKER MUDA	9	4.522.500
	APOTEKER MADYA	11	7.020.000
	APOTEKER UTAMA	13	9.277.500
26	ASISTEN APOTEKER		
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5	2.531.250
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	2.850.000
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.277.500
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	3.930.000
27	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA	8	3.930.000
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA	9	4.522.500
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA	11	7.020.000
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA	13	9.277.500

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
<b>28</b>	<b>PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL</b>		
	<b>PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA</b>	<b>5</b>	<b>2.531.250</b>
	<b>PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>29</b>	<b>FISIOTERAPIS AHLI</b>		
	<b>FISIOTERAPIS PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>FISIOTERAPIS MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>FISIOTERAPIS MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>FISIOTERAPIS UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>30</b>	<b>FISIOTERAPIS TERAMPIL</b>		
	<b>FISIOTERAPIS PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>FISIOTERAPIS PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>31</b>	<b>RADIOGRAFER TERAMPIL</b>		
	<b>RADIOGRAFER PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>RADIOGRAFER PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>32</b>	<b>PEREKAM MEDIS</b>		
	<b>PEREKAM MEDIS PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>PEREKAM MEDIS PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
<b>33</b>	<b>NUTRISIONIS AHLI</b>		
	<b>NUTRISIONIS PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>NUTRISIONIS MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>NUTRISIONIS MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>NUTRISIONIS UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>34</b>	<b>NUTRISIONIS TERAMPIL</b>		
	<b>NUTRISIONIS PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>NUTRISIONIS PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>35</b>	<b>ADMINISTRATOR KESEHATAN</b>		
	<b>ADMINISTRATOR PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>ADMINISTRATOR MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>ADMINISTRATOR MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>ADMINISTRATOR UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>36</b>	<b>PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI</b>		
	<b>PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>37</b>	<b>BIDAN AHLI</b>		
	<b>BIDAN PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>BIDAN MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>BIDAN MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>BIDAN UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
<b>38</b>	<b>BIDAN TERAMPIL</b>		
	<b>BIDAN PELAKSANA PEMULA</b>	<b>5</b>	<b>2.531.250</b>
	<b>BIDAN PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>BIDAN PELAKSANA LANJUTAN</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>BIDAN PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
<b>39</b>	<b>PENYIDIK PPNS</b>		
	<b>PENYIDIK PPNS PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PENYIDIK PPNS MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PENYIDIK PPNS MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PENYIDIK PPNS UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>40</b>	<b>PENYULUH HUKUM AHLI</b>		
	<b>PENYULUH HUKUM PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>PENYULUH HUKUM MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>PENYULUH HUKUM MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>PENYULUH HUKUM UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>41</b>	<b>ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI</b>		
	<b>ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>
	<b>ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA</b>	<b>9</b>	<b>4.522.500</b>
	<b>ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA</b>	<b>11</b>	<b>7.020.000</b>
	<b>ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA</b>	<b>13</b>	<b>9.277.500</b>
<b>42</b>	<b>PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL</b>		
	<b>PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA</b>	<b>5</b>	<b>2.531.250</b>
	<b>PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA</b>	<b>6</b>	<b>2.850.000</b>
	<b>PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR</b>	<b>7</b>	<b>3.277.500</b>
	<b>PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA</b>	<b>8</b>	<b>3.930.000</b>

**C. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
<b>STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI</b>			
1	STAF AHLI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN DAN PERTANAHAN	16	24.405.000
2	STAF AHLI BIDANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	16	24.405.000
3	STAF AHLI BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM	16	24.405.000
4	STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI	16	24.405.000
5	STAF AHLI BIDANG POLITIK SOSIAL DAN KEAMANAN	16	24.405.000
6	STAF KHUSUS MENTERI	15	15.997.500
<b>ANGGOTA TEKNIS BHP</b>			
	ANGGOTA TEKNIS HUKUM	10	5.197.500
<b>FUNGSIONAL UMUM</b>			
1	BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT	8	3.930.000
2	BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT	8	3.930.000
3	ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
4	ANALIS JABATAN	7	3.277.500
5	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	7	3.277.500
6	ANALIS KELEMBAGAAN	7	3.277.500
7	ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
8	ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI	7	3.277.500
9	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	7	3.277.500

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
10	ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM	7	3.277.500
11	ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI	7	3.277.500
12	ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	7	3.277.500
13	ANALIS PERATURAN DAERAH	7	3.277.500
14	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	7	3.277.500
15	ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA	7	3.277.500
16	ANALIS PERMASALAHAN HAM	7	3.277.500
17	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	7	3.277.500
18	ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	7	3.277.500
19	ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	7	3.277.500
20	ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM	7	3.277.500
21	ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI	7	3.277.500
22	ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM	7	3.277.500
23	ANALIS PROGRAM BIMBINGAN	7	3.277.500
24	ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
25	ANALIS SIDIK JARI	7	3.277.500
26	ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	7	3.277.500
27	ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA	7	3.277.500
28	ANALIS STANDARISASI SARANA KERJA	7	3.277.500
29	BENDAHARA PENERIMAAN SATKER	7	3.277.500
30	BENDAHARA PENGELUARAN SATKER	7	3.277.500
31	NAHKODA	7	3.277.500
32	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	7	3.277.500
33	PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN	7	3.277.500
34	PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI	7	3.277.500

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
35	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	7	3.277.500
36	PENERJEMAHAN BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
37	PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	3.277.500
38	PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	7	3.277.500
39	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	7	3.277.500
40	PENYUSUN INFORMASI HUKUM	7	3.277.500
41	PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH	7	3.277.500
42	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	7	3.277.500
43	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.277.500
44	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	7	3.277.500
45	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	3.277.500
46	PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	7	3.277.500
47	PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.277.500
48	PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN	7	3.277.500
49	PENYUSUN NASKAH AKADEMIK	7	3.277.500
50	PENYUSUN PROGRAM	7	3.277.500
51	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	7	3.277.500
52	PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.277.500
53	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA	7	3.277.500
54	DOKUMENTALIS HUKUM	6	2.850.000
55	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	6	2.850.000

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
56	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	6	2.850.000
57	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	6	2.850.000
58	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	6	2.850.000
59	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	2.850.000
60	PENGELOLA BASAN/BARAN	6	2.850.000
61	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	6	2.850.000
62	PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN	6	2.850.000
63	PENGELOLA HASIL KERJA	6	2.850.000
64	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI	6	2.850.000
65	PENGELOLA KEUANGAN	6	2.850.000
66	PENGELOLA KEMANDIRIAN PEMBIMBINGAN	6	2.850.000
67	PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL	6	2.850.000
68	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	6	2.850.000
69	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	6	2.850.000
70	PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI	6	2.850.000
71	PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA	6	2.850.000
72	REGISTRATOR PEMASYARAKATAN	6	2.850.000
73	PENGELOLA RUMAH DETENSI	6	2.850.000
74	PENGELOLA SARANA KERJA	6	2.850.000
75	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	6	2.850.000
76	PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PNS	6	2.850.000
77	PENGELOLA WEBSITE	6	2.850.000
78	PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM	6	2.850.000
79	PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	2.850.000
80	PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	2.850.000



NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
81	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI	6	2.850.000
82	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	6	2.850.000
83	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	2.850.000
84	PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	2.850.000
85	PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	6	2.850.000
86	PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	2.850.000
87	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	2.850.000
88	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	6	2.850.000
89	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING	6	2.850.000
90	PENGOLAH DATA ANGGARAN	6	2.850.000
91	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE	6	2.850.000
92	PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI	6	2.850.000
93	PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	6	2.850.000
94	PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM	6	2.850.000
95	PENGOLAH DATA DISEMINASI HAM	6	2.850.000
96	PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI	6	2.850.000
97	PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS	6	2.850.000
98	PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN	6	2.850.000

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
99	PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI	6	2.850.000
100	PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN	6	2.850.000
101	PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN	6	2.850.000
102	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	6	2.850.000
103	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	6	2.850.000
104	PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTAR BADAN INTERNASIONAL	6	2.850.000
105	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	6	2.850.000
106	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6	2.850.000
107	PENGOLAH DATA KERJASAMA	6	2.850.000
108	PENGOLAH DATA KESEHATAN	6	2.850.000
109	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI	6	2.850.000
110	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG	6	2.850.000
111	PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS	6	2.850.000
112	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	2.850.000
113	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	2.850.000
114	PENGOLAH DATA LAPORAN	6	2.850.000
115	PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	6	2.850.000
116	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	2.850.000

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
117	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK KELOMPOK RENTAN	6	2.850.000
118	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK	6	2.850.000
119	PENGOLAH DATA LAPORAN HAM YANG BERAT	6	2.850.000
120	PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN	6	2.850.000
121	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	2.850.000
122	PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI	6	2.850.000
123	PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAM	6	2.850.000
124	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN	6	2.850.000
125	PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI	6	2.850.000
126	PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE	6	2.850.000
127	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAM	6	2.850.000
128	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	6	2.850.000
129	PENGOLAH DATA WASIAT	6	2.850.000
130	PENGOLAH SAI	6	2.850.000
131	PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	6	2.850.000
132	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	6	2.850.000
133	ROHANIAWAN AGAMA/PEMBIMBING AGAMA	6	2.850.000
134	SEKRETARIS PIMPINAN	6	2.850.000
135	TEKNISI JARINGAN	6	2.850.000
136	VERIFIKATOR	6	2.850.000

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
137	OPERATOR KOMPUTER	5	2.531.250
138	PEMBUAT DAFTAR GAJI	5	2.531.250
139	PEMELIHARA KANTOR	5	2.531.250
140	PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB	5	2.531.250
141	PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN	5	2.531.250
142	PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI	5	2.531.250
143	PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING	5	2.531.250
144	PEMROSES JAMINAN SOSIAL	5	2.531.250
145	PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM	5	2.531.250
146	PEMROSES LEGALISASI	5	2.531.250
147	PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN	5	2.531.250
148	PEMROSES PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5	2.531.250
149	PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN RI	5	2.531.250
150	PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN	5	2.531.250
151	PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	5	2.531.250
152	PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	2.531.250
153	PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN	5	2.531.250
154	PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING	5	2.531.250
155	PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSUN	5	2.531.250
156	PENATAUSAHAAN	5	2.531.250
157	PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK	5	2.531.250
158	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	5	2.531.250

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
159	PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	5	2.531.250
160	PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA	5	2.531.250
161	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	5	2.531.250
162	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	5	2.531.250
163	PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI	5	2.531.250
164	PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	5	2.531.250
165	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN	5	2.531.250
166	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	2.531.250
167	PENGADMINISTRASI UMUM	5	2.531.250
168	PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
169	PENGAMBIL SIDIK JARI	5	2.531.250
170	PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	5	2.531.250
171	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	5	2.531.250
172	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	5	2.531.250
173	PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN	5	2.531.250
174	PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN	5	2.531.250
175	PENGELOLA KENDARAAN DINAS	5	2.531.250
176	PENGELOLA TATA NASKAH	5	2.531.250
177	PENGHIMPUN BERITA	5	2.531.250
178	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	2.531.250
179	PENGHUBUNG ANTAR LEMBAGA	5	2.531.250
180	PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN	5	2.531.250
181	PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	2.531.250
182	PENGOLAH ARSIP TERAPAN	5	2.531.250
183	PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI	5	2.531.250

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
184	PENGOLAH DATA INVENTARIS	5	2.531.250
185	PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN	5	2.531.250
186	PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL	5	2.531.250
187	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN	5	2.531.250
188	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	5	2.531.250
189	PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN	5	2.531.250
190	PENGOLAH DATA SIDIK JARI	5	2.531.250
191	PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN	5	2.531.250
192	PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
193	PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH	5	2.531.250
194	PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
195	PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
196	PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS	5	2.531.250
197	PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI	5	2.531.250
198	PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH	5	2.531.250
199	PENYIAP BAHAN LEGALISASI	5	2.531.250
200	PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5	2.531.250
201	PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN	5	2.531.250
202	PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM	5	2.531.250
203	PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5	2.531.250
204	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM	5	2.531.250

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
205	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	2.531.250
206	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI	5	2.531.250
207	PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM	5	2.531.250
208	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	5	2.531.250
209	PENYIAP BAHAN PUBLIKASI	5	2.531.250
210	PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
211	PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN	5	2.531.250
212	PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI	5	2.531.250
213	PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	5	2.531.250
214	PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	2.531.250
215	PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM	5	2.531.250
216	PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	2.531.250
217	PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER)	5	2.531.250
218	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	5	2.531.250
219	PETUGAS PENGAMANAN DETENI	5	2.531.250
220	PETUGAS PROTOKOL	5	2.531.250
221	POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN	5	2.531.250
222	SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA	5	2.531.250
223	TEKNISI	5	2.531.250
224	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	4	2.365.500
225	OPERATOR MESIN	4	2.365.500
226	OPERATOR TELEPON	4	2.365.500

<b>NO.</b>	<b>NAMA JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)</b>
227	PRAMU ACARA	4	2.365.500
228	TARUNA AKADEMI	4	2.365.500
229	PENGEMUDI	3	2.211.000
230	AGENDARIS	3	2.211.000
231	PETUGAS PENGGANDAAN	3	2.211.000
232	CARAKA	3	2.211.000

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 22 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN DAN SURAT KETERANGAN

A. SURAT PERMOHONAN IZIN

KOP SURAT

SURAT PERMOHONAN IZIN

(TidakMasuk/TerlambatMasukKerja/PulangSebelumWaktunya/ TidakBerada Di  
 TempatTugas/TidakMelakukanRekamKehadiran)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol : .....  
 Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari..... tanggal ..... saya  
 tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak  
 berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran\*) karena  
 .....

....., ..... 20....

Persetujuan atasan langsung,

.....,

.....

.....

\*) coret yang tidak perlu.

**B. SURAT KETERANGAN**

**KOP SURAT**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

**Yang bertandatangan di bawah ini:**

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

**Dengan ini menerangkan bahwa:**

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

pada hari..... tanggal ..... tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran\*) karena ada keperluan penting dan mendesak yaitu .....

....., ..... 20....

**Atasan Langsung,**

.....  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 22 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

KOP SURAT

LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN  
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

1. DATA PEGAWAI

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :

2. CAPAIAN NILAI SKP

- a. Nomordantanggal SKP :
- b. Periode : Januari – Juli/ Juli – Desember (coretsalabsatu)
- c. Nilai SKP :

3. KETAATAN TERHADAP PENENTUAN KEHADIRAN

No	Uraian	Potongan per kejadian	Jumlah Kehadiran	Jumlah Potongan (Rp.)
a	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar dengan alasan yang sah.	....%		
b	Pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah.	....%		
c	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa alasan yang sah	....%		

d	Pegawai terlambat masuk kerja/ kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan, dan/atau kantor pada jam kerja tanpa alasan.	....%		
<b>JUMLAH</b>				

**4. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI**

No	Uraian Cuti	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1	(Uraikan cuti yang dilaksanakan)	(dibayarkan sejumlah ...% selama .... Bulan) sejumlah Rp..... setiap bulannya.

**5. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI**

6.1.	Jumlah bruto	:	Rp.
6.2.	Penyesuaian atas capaian nilai SKP	:	Rp.
6.3.	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kode etik dan disiplin	:	Rp.
6.4.	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kehadiran	:	Rp.
6.5.	Penyesuaian atas pelaksanaan cuti	:	Rp.
	<b>Jumlah Netto</b>		<b>Rp.</b>

Tanggal : ..... 20...  
PEJABAT YANG BERWENANG,

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN